**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG**

Oleh : **Megga Puspitha Juanda**

**158010027**

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan : (1) bagaimana implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung; (2) bagaimana strategi efektivitas implementasi P2KP di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji serta menganalisis implementasi P2KP dan strategi efektivitas implementasi P2KP di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen dengan menggunakan analisa kualitatif. Peneliti menguji teori implementasi kebijakan Charles O. Jones bahwa implementasi program dipengaruhi oleh *pengorganisasian, interpretasi,* dan *aplikasi*.

***POLICY IMPLEMENTATION ABOUT URBAN POVERTY PROGRAM P2KP IN VILLAGE MARGASARI SUB DISTRICT BUAHBATU BANDUNG***

**Megga Puspitha Juanda**

**158010027**

***ABSTRACT***

*Problems in this research are formulated: (1) how the implementation of policy of Urban Poverty Program (P2KP) in Kelurahan Margasari Subdistrict of Buah Batu City Bandung; (2) how strategy of effectiveness of P2KP implementation in Kelurahan Margasari Subdistrict of Buah Batu City of Bandung. Therefore, this study aims to examine and analyze the implementation of P2KP and implementation effectiveness strategy P2KP in Kelurahan Margasari District Buah Batu Bandung.
To get answers from the research objectives that have been determined, this research uses descriptive qualitative methods, where the authors describe the facts obtained through observation, interviews, and document review by using qualitative analysis. Researchers tested the theory of policy implementation of Charles O. Jones that program implementation is influenced by organizing, interpretation, and application.*

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ketahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian Negara Indonesia.Kemiskinan merupakan masalah yang pada umunya dihadapi hampIr di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model *top down* ke *bottom up*, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap menyisakan persoalan sepertinya tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani.Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan.

Program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain; *pertama*, P2KP adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat. Utamanya ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan yang menerima dampak paling berat akibat krisis ekonomi. Dijelaskan pula bukan berarti masyarakat miskin pedesaan tidak diperhatikan. Tetapi masyarakat perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya.

*Kedua*, program P2KP bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang bersifat penyelamatan (*rescue*) atau pemulihan (*recovery*) yang berjangka pendek seperti program sejenis lainnya. Tetapi lebih merupakan pengentasan kemiskinan (*poverty allviation*) melalui pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) secara utuh, simultan, berkelanjutan dan berjangka panjang.

*Ketiga*, melalui pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan masyarakat diharapkan bisa dikembangkan suatu proses pengorganisasian yang aspiratif, terbuka, adil dan demokratis yang mewakili kelompok usaha dari masyarakat di wilayah sasaran program. Perwujudannya adalah pembentukan kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kelurahan sebagai wadah usaha bersama baik di bidang ekonomi, sosial maupun untuk kegiatan lainnya.

*Keempat*, sebagai stimulan, melalui program P2KP diupayakan dana pinjaman sebesar 800 milyar dari Bank Dunia guna membantu masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka memberdayakan kehidupan mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (*small scale bussiness*), pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan serta penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Artinya, sekali lagi menurut pemahaman peneliti, bantuan dan pinjaman bagi masyarakat miskin bukanlah tujuan utama program P2KP. Dana hanyalah sekedar sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya membangun keberdayaan.

Beberapa penanggulangan persoalan kemiskinan yang dilakukan pemerintah antara lain dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Bentuk pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang sifatnya bergulir maupun hibah. Dana pinjaman P2KP merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja, sepengetahuan penanggung jawab operasional (PJOK) yang ditunjuk dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja suatu usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.
2. Memberikan bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian masyarakat mampu melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka penanggulangan berbagai masalah kemiskinan yang dihadapi.

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

**Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Lalu implementasi kebijakan menurut Dunn (2003:132) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

 Proses kebijkan publik menurut Dunn dalam Pasolong (2012:41) antara lain:

1. Penetapan agenda kebijakan,
2. Adopsi kebijakan,
3. Implementasi kebijakan, dan
4. Evaluasi kebijakan.

Teori Charles O. Jones (1977: 4), implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni:

1. Pengorganisasian.
2. Interpretasi.
3. Penerapan atau aplikasi.

Indikator pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

1. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

1. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

## Konsep Implementasi Program

Menurut Charles O. Jones (1977: 4) implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni:

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini, program P2KP harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur.

1. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, program harus memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program. Agar program P2KP dan tujuannya dapat tercapai secara optimal

1. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaiman pekerjaan harus diselesaikan

## Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh sebagian orang di wilayah kota, baik di bidang ekonomi seperti kurangnya pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kepemilikan aset produktif, tidak memiliki akses ke sumberdaya modal seperti kredit perbankan, di bidang sosial yang diindikasikan dengan kurangnya akses terhadap fasilitas dan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dibidang lingkungan yang diindikasikan dengan munculnya permukiman kumuh dan liar sehingga tidak sehat (Buku Pedoman KPK, 2003).

## Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Sharp (dalam Mudrajad, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

## Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan dijabarkan kedalam 4 pilar langkah kebijakan yang menjadi acuan bagi stakeholders dalam proses penyusunan *poverty reduction strategy papers* (PRSP) adalah sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan, yakni pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, dan mampu secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi;
3. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan dasar masyarakat miskin agar mampu bekerja berusaha secara lebih produktif, dan memperjuangkan kepentingannya;
4. Perlindungan sosial, yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

## Strategi Efektivitas Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Margasari

### Pengorganisasian

Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar. Ada beberapa hal penting mengenai konsep birokrasi. *Pertama*, sistem ideal birokrasi Weber dalam kenyataannya jarang terealisasi sehingga perlu ditekankan dalam implementasi. *Kedua*, implementasi adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan. Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi pelaksana.Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa *“the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development.”* Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang

### Interpretasi/Penafsiran Program

Pelaksanaan P2KP yang memiliki cakupan sangat luas, baik wilayah maupunkelompok sasaran, menuntut peran kunci strategi sosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan P2KP yang akan melibatkan berbagai *stakeholders*. Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatan sosialisasi dalam P2KP harus dilakukansecara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yanghendak dicapai, siapa saja khalayak yang akanmenjadi sasaran sosialisasi, pesan yanghendak disampaikan, materi per kelompok khalayak,teknis penyampaian, media yang digunakan, dan siapa pelakunya. Hanya denganmodel sosialisasi yang utuh tersebut yang akanmenjamin terwujudnya penyamaan persepsi sertatumbuhnya motivasi masyarakat Kelurahan Margasari sesuai dengan yang diharapkan P2KP.

### Penerapan/Aplikasi

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan P2KP harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones (1994: 328) mengemukakan bahwa aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif.

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan.Aplikasi juga harus mempertimbangkan aspek politik, dimana politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak dan juga rawan konflik.

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, strategi yang dikembangkan di Kelurahan Margasari adalah sebagai berikut:

1. Menguji kelayakan BKM, KSM maupun anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah dipersiapkan sebelum memulai program pinjaman bergulir di suatu kelurahan sasaran.
2. Memberikan pelatihan pendahuluan bagi BKM sebelum pinjaman bergulir dimulai.
3. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi semua calon manajer dan staf pengelola UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulir dimulai serta pelatihan lanjutan bagi manajer UPK/staf yang menunjukkan kinerja pengelolaan pinjaman bergulir yang baik untuk dapatdikembangkan lebih lanjut sebagai program kreditmikro.
4. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalam rangka memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir kepada BKM oleh KMP,KMW maupun konsultan dari luar yang mempunyai kemampuan memadai.
5. Mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan pengelolaan pinjaman bergulir sebagai upaya melakukan perbaikan terusmenerus.
6. Mendorong terjadinya pelatihan di tingkat kelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihan dasar sebelum kelompok menerima pinjamann maupun pelatihan yang bersifat teknis pembelajaran dan pengembangan usaha.
7. Memfasilitasi akses BKM terhadap sumberdaya luar yang ada, baik menyangkut dukungan keuangan maupun bantuan teknis khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pinjaman bergulir.

**Penutup/Kesimpulan**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis P2KP. Keseluruhan tahapan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanaan yang ada. Adapun strategi yang digunakan pengelola P2KP di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dalam rangka mengefektifkan implementasi program P2KP adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi pengelolaan P2KP di Kelurahan Margasari dibentuk badan pelaksana P2KP seperti PJOK di tingkat Kecamatan, BKM di tingkat Kelurahan, dan kelompok-kelompok masyarakat (KSM) di tingkat masyarakat. Tugas-tugas pelaksana P2KP tersebut sudah dilakukan secara terstruktur dan terarah.
2. Upaya yang dilakukan agar para pelaksana P2KP di Kelurahan Margasari memiliki pemahaman yang sama mengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip, dan nilai serta mekanisme pelaksanaan P2K didapatkan dari bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk kegiatan pelatihan. Akan tetapi, pemahaman mengenai program penanggulangan kemiskinan tidak terlalu banyak dipahami oleh masyarakat dikarenakan area wilayah Kelurahan Margasari yang cukup luas sehingga pelaksanaan sosiliasi terhambat dengan minimnya sumber daya manusia yang ada. Selain itu, kurangnya pemahaman tersebut juga dikarenakan oleh nama program yang sering berubah-ubah untuk itu perlunya peningkatan sosialisasi terutama di tingkat masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan P2KP di Kelurahan Margasari menerapkan *Standard Operational Procedure* yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Agar tujuan dari terwujud strategi yang dilaksanakan dalam kegiatan P2KP di Kelurahan Margasari adalah mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak miskin menuju masyarakat berdaya dengan 4 (empat) tahapan, yakni *pertama*, internalisasi nilai dan prinsip universal melalui kegiatan penyiapan masyarakat seperti Rembug Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan, dan Pemetaan Swadaya. *Kedua*, penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok masyarakat. *Ketiga*, pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanan Kemiskinan (PJM Pronangkis). *Keempat*, penguatan akuntabilitas masyarakat melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
4. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margasari merupakan pola pemberdayaan masyarakat miskin dengan strategi *direct-action* dengan mengupayakan partisipasi semua pihak melalui institusi lokal yang dibentuk warga masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afrida BR. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Anonim. 1998. *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

--------------- .1998. Petunjuk *Pelaksanaan Tabungan Keluarga Sejahtera Bagi Kader.* Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Anto dayan. 1989. *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. Jakarta: LP3ES.

Bappenas. 2003. *Sistim Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.

Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaja. 1988. *Pengantar pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Chamsiah Djamal. dkk. 1994. *Panduan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 1999. *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Buku Pedoman Umum*. Jakarta.

Ginanjar Kartasasmita . 1996 . *Pembangunan Untuk Rakyat* . Jakarta: Cidies.

Gunawan Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Bina Rena Pariwara.

Hutagalung. 1964. *Masalah Pembentukan Modal di Negara – negara Yang Sedang Membangun*. Jakarta: Bhratara.

Hermawan Wasito. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.

Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2003. *Informasi dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Jakarta.

Lincolin Arsyad. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Lembaga Penelitian SMERU. 2001. *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.

Moh .Nasir. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Novianto Wibowo. 2000. *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Pangsa . 2003 . *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.

Sadono Sukirno. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Singgih Santoso. 2004. *SPSS (Statistik Multivariat).* Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sondang P. Siagian. 1999. *Ekonomi Pembangunan suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soni Sumarsono. 2003. Ek*onomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV.Alfabeta.

Suhadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta.

Sumadi Suryasubrata. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafika.

Sumahamijaya.S . 1980. *Membina Sikap Mental Wiraswasta*. Jakarta: Gunung Jati.

Sumanto.W. 1984. *Sekuncup Ide Operasional. Pendidikan Wiraswasta*. Jakarta:

Bumi Aksara.

Sumitro Djojohadikusumo. 1978. *Undang – Undang Pajak Pendapatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Todaro Michael P. 2000 . *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* . Jakarta: Erlangga.

Tulus Tambunan. 1998. *Ekonomi Pembangunan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 1986. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Bandung: Tarsito.